

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Politik elektoral adalah proses dan aktivitas yang terkait dengan pemilihan umum atau pemilihan politik lainnya di mana warga negara memilih pemimpin dan perwakilan mereka dalam pemerintahan. Ini termasuk kampanye politik, pemilihan kandidat, debat, pemungutan suara, dan proses demokratis lainnya yang terlibat dalam menentukan siapa yang akan memegang jabatan politik. Politik elektoral sangat penting dalam sistem demokratis karena memungkinkan warga negara untuk memilih siapa yang akan memegang jabatan politik.

Politik elektoral memberikan kesempatan bagi partai politik dalam menjalankan fungsi sosialisasi dan rekrutmen. Partai politik memberikan ide dan program kerja selama proses sosialisasi. Partai politik juga berusaha untuk mempersiapkan kandidat untuk posisi publik. Oleh karena itu, ketika masuk pada politik elektoral partai politik mempersiapkan strategi pemenangan dengan membentuk persepsi publik berkaitan dengan kandidat tertentu. Tidak diragukan lagi, kinerja ini didukung oleh sistem politik yang bekerja dengan baik, yang menawarkan program dan kebijakan yang berbeda untuk partai politik untuk menarik simpati masyarakat.

Tidak dapat dipungkiri, dalam praktiknya, partai politik tidak hanya memaparkan program, *platform* ideologi dan juga *platform* kebijakan. Partai politik juga membagikan sumberdaya baik dalam bentuk uang maupun lainnya kepada pemilih sebagai *reward* untuk suara yang dijanjikan oleh pemilih (Nichter, 2014). Distribusi sumberdaya seperti ini disebut sebagai distribusi klientelistik. Hal yang dimaksud dengan distribusi klientelistik adalah pemberian barang dan jasa yang dibutuhkan oleh pemilih seperti makanan, obat-obatan hingga kebutuhan lain (Jordan, Mazzuca, & Nichter, 2014).

Guna memastikan proses distribusi sumberdaya berjalan dengan baik dan juga tepat sasaran, maka partai politik harus memiliki jejaring-jejarang di

bawahnya. Jejaring yang dimaksud bukan hanya yang dating dari partai politik melainkan dari luar partai politik. Jaringan dari luar partai politik adalah disebut sebagai *broker*. Mereka bertugas untuk mencari informasi yang tepat tentang apa yang dibutuhkan oleh pemilih yang berada di bawahnya. *Broker* dijadikan patron bagi para pemilih untuk mendistribusikan sumber daya (Jordan, Mazzuca, & Nichter, 2014). *Broker* merupakan patron yang memiliki banyak klien dan memiliki pengaruh terhadap keputusan pemilih dalam pemilihan umum.

Broker ini adalah bagian dari tim sukses non-resmi yang berfungsi sebagai patron di masyarakat dan memahami pemilih di wilayah tertentu. Ketika seorang kandidat menyediakan barang dan jasa yang harus diberikan kepada pemilih, *broker* berperan dalam menjaga suara yang dikuasainya untuk dapat ditujukan kepada kandidat yang didukungnya. Artinya *broker* berperan sebagai perantara bagi kandidat dan juga pemilih karena *broker* memiliki pengaruh yang besar dalam memobilisasi suara konstituen dari kandidat atau bisa juga disebut sebagai strategi klientelistik (Ardiansa dkk, 2018).

Dalam hal pileg, para *broker* berperan sebagai alat politik untuk memenangkan seorang kandidat calon anggota legislatif. Penggunaan *broker* didasarkan pada kenyataan bahwa seseorang yang berkontestasi menggunakan strategi klientelistik untuk mengenali pemilih untuk memberikan apa yang dibutuhkan oleh pemilih tersebut. *Broker* menggunakan jaringan sosial mereka untuk membantu kandidat mendapatkan apa yang mereka inginkan, yaitu suara, yang menjadi dasar bagi seorang kandidat untuk mengatakan bahwa mereka mendapatkan dukungan. Karena calon kandidat akan memberikan keuntungan material dan nonmaterial kepada *broker*, terjadi simbiosis mutualisme antara *broker* dan kandidat calon.

Terdapat beberapa contoh kasus penggunaan *broker* dalam Pemilu. Misalnya yang dijelaskan oleh Aspinall & As'ad (2015) di pemilu Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Kandidat yang merupakan petahana menggunakan peran kepala desa sebagai *broker*. Dalam kasus ini kepala desa menjadi *broker* yang efektif karena mereka dapat memberikan pengaruh dan

mampu mengarahkan pilihan warga desanya akibat rekam jejaknya yang dianggap sebagai “tetua” yang sangat dihormati. Sebagai imbalannya, para *broker* yang mendapatkan pembangunan infrastruktur desa yang membuat nama dari para *broker* ini semakin disegani dan juga mendapatkan bantuan hewan kurban yang disebar di 23 desa.

Selain itu terdapat pula kasus di Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Kasus ini cukup unik bahwa ternyata kekuatan partai politik saja tidaklah cukup untuk memenangkan seorang kandidat. Pasangan Ibrahim Rewa dan Makmur A. Satta yang hanya diusung oleh satu partai, memenangkan pertarungan dengan meraup 40,1% dari total suara yang direkapitulasi. Kemenangan ini dapat diwujudkan dengan dukungan dari para *broker* yang merupakan aparat birokrasi pemerintah daerah di tujuh kecamatan (Agustino, 2014).

Dari contoh di atas menjelaskan bahwa dalam suatu proses pemilu kemunculan *broker* menjadi sangat krusial bahkan hampir mampu mengalahkan partai politik yang memenangkan kandidat. Penggunaan *broker* didasarkan pada kenyataan bahwa seseorang yang berkontestasi menggunakan strategi klientelistik untuk mengenali pemilih untuk memberikan apa yang dibutuhkan oleh pemilih tersebut. *Broker* menggunakan jaringan sosial mereka untuk membantu kandidat mendapatkan suara, yang merupakan tujuan utama kandidat. Dengan demikian, seorang kandidat dapat menyatakan bahwa mereka menerima dukungan. Karena calon kandidat akan memberikan keuntungan material dan nonmaterial kepada *broker*, terjadi simbiosis mutualisme antara *broker* dan calon kandidat.

Simbiosis mutualisme yang dimaksud telah banyak dibicarakan. Aspinall (2014) menyatakan bahwa hubungan antara kandidat dan *broker* terjadi karena adanya ikatan ideologis, politik, etnis, agama atau komitmen lainnya. Sementara itu, Tawakall dkk (2017) juga menyampaikan bahwa hubungan kekeluargaan terhadap kandidat atau partai politik menjadi motivasi utama dalam memotivasi *broker* untuk mendukung kandidat. Ketika *broker* berkhianat, *broker* akan

khawatir jikalau nantinya akan timbul ketidakharmonisan dan kehilangan hubungan persahabatan dengan kandidat yang bersangkutan.

Penelitian ini berusaha memberikan pandangan sebaliknya, yaitu bahwa motivasi *broker* adalah murni transaksional. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Carty (1981) bahwa hubungan *broker* dengan kandidat tidaklah didasarkan hubungan yang ideologis melainkan pragmatis sehingga berbentuk ikatan personal, individual, dan parokial. Penelitian ini ingin membuktikan bahwa yang terjadi di lapangan dalam studi kasus yang diangkat adalah murni transaksional dan klientelistik.

Salah satu contoh dari penggunaan broker dalam pemilihan legislatif akan diangkat dalam studi kasus ini. Dalam pemilihan legislatif yang terjadi di Kabupaten tuban tahun 2019, terdapat satu kajian yang menarik untuk diteliti. Di sana salah satu calon anggota legislatif yang bernama Moh. Saefulloh Ponco Eko dari Partai PKB yang mendapatkan kemenangan lewat jasa broker. Dalam hal ini, broker yang dimaksud adalah kepala desa yang berada di dapil III Tuban yang meliputi Kecamatan Soko, Kecamatan Rengel, Kecamatan Semanding dan Kecamatan Grabagan. Berdasarkan data rekapitulasi suara di KPU, kandidat mendapatkan kursi di DPRD kabupaten Tuban karena berhasil memperoleh 10.698 suara di Dapilnya.

Kepala desa memiliki motivasi berupa transaksi yang pragmatis dan bertindak sebagai mesin politik yang efektif bagi pemenangan kandidat di Dapil Tuban 3. Penelitian ini berusaha menjelaskan apa saja motivasi dari para kepala desa sebagai broker dan apa saja peran yang mereka lakukan untuk memenangkan kandidat calon legislatif di tahun 2019.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kepala desa berperan sebagai broker politik dalam Pileg 2019 di Kabupaten Tuban?

2. Apa strategi yang digunakan oleh calon legislatif untuk memperoleh dukungan dari kepala desa?
3. Bagaimana kontribusi peran kepala desa sebagai broker terhadap kemenangan calon legislatif?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan peran kepala desa dalam konteks politik lokal sebagai broker politik yang memediasi dan memobilisasi dukungan untuk Mohamad Saifullah Ponco.
2. Menganalisis strategi yang diterapkan oleh Mohamad Saifullah Ponco dalam memenangkan dukungan kepala desa dan komunitas di tingkat desa.
3. Mengevaluasi sejauh mana kontribusi peran kepala desa berdampak pada kemenangan Mohamad Saifullah Ponco sebagai anggota legislatif.
4. Menyelidiki faktor-faktor yang memengaruhi kepala desa dalam memilih mendukung Mohamad Saifullah Ponco dan bagaimana faktor-faktor tersebut memainkan peran dalam proses pemilihan.
5. Mengkaji dampak peran kepala desa sebagai broker politik terhadap legitimasi politik lokal, serta bagaimana hal ini dapat memengaruhi hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat.

Melalui pencapaian tujuan-tujuan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang dinamika politik lokal di Kabupaten Tuban pada saat Pileg 2019 serta relevansinya terhadap struktur politik dan kehidupan masyarakat di tingkat desa.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, tesis ini akan membantu melihat bagaimana peran broker dalam kemenangan pemilu legislatif.
2. Secara praktis, tesis ini bermanfaat untuk melihat pola para broker yang ke depan dapat diantisipasi untuk Pembangunan demokrasi yang lebih sehat.

1.5 Batasan Definisi/Istilah

Dalam teori politik, broker biasanya dipahami sebagai sebuah individu atau kelompok kecil yang bisa mengakses ekonomi, politik dan sosial atau bahasa lainnya disebut dengan mediator atau *middle man* (perantara). Katherine dan Lynette (2012) menjelaskan dua ciri utama broker. *Pertama*, broker memiliki kapasitas untuk memudahkan interaksi sosial, meningkatkan aktivitas ekonomi, dan memfasilitasi pembangunan politik. *Kedua*, sebaliknya, broker seringkali melahirkan eksploitasi, pengejaran keuntungan pribadi, korupsi, dan akumulasi kekuasaan; melalui proses ini dan proses lainnya, broker dapat memperburuk kesetaraan yang ada.

Dalam penelitian ini, peneliti fokus menggunakan konsep broker yang digagas oleh Susan Stokes yang mampu menjelaskan kemunculan broker yang berdasarkan pendekatan klientelisme. Secara praktis penelitian ini ingin memberikan penjelasan mengenai peran dan strategi broker yang bertindak sebagai mesin politik yang berhasil memenangkan calon legislatif menjadi anggota DPRD Kabupaten periode 2019 – 2024 dengan perolehan tertinggi nomor dua se-Kabupaten Tuban.